

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPMD, Program dan Kegiatan yang memuat: Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan dana Indikatif serta sumber dana. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkalpinang, Agustus 2018

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

**H. M. YULISWAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600205 198103 1 015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja DPMD tahun 2017 dan capaian Renstra DPMD
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan DPMD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja DPMD
- 3.2 Program dan kegiatan tahun 2018

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPMD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja dan dilengkapi dengan pendanaan.

Terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Tahun 2019 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Untuk dapat melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan penjabaran dari

RPJMD 2017-2022 dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMD

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar belakang
- 1.6. Landasan hukum
- 1.7. Maksud dan tujuan
- 1.8. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN 2018

- 2.5 Evaluasi pelaksanaan Renja DPMD tahun 2018 dan capaian Renstra DPMD
- 2.6 Analisis kinerja pelayanan DPMD
- 2.7 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD
- 2.8 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja DPMD

3.2 Program dan kegiatan tahun 2019

BAB IV PENUTUP

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMD tahun lalu dan capaian Renstra DPMD

Evaluasi pelaksanaan renja DPMD tahun 2018 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DPMD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPMD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 mendapatkan alokasi Dana awal sebesar Rp.12.565.076.998,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.440.309.318,00,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 7.124.767.680,00,-, terdiri dari 4 Program urusan Rutin/Wajib dan 5 Program urusan wajib dimana dari 9 program tersebut terdapat 42 kegiatan.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2018 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) Tahun 2018.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku. Untuk 14 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2018,

dengan adanya penyesuaian Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 ada 14 kegiatan yang dianggarkan kembali pada APBD Tahun 2018 dan dilaksanakan sampai triwulan ke II. Untuk 14 kegiatan yang dilaksanakan, realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke II sebesar 99,30% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

Tabel 1.

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Triwulan II Tahun 2018

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Triwulan II Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Triwulan II Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | |
|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------|---|----------|
| | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| <i>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | 100,00 | 2.035.097.023 | | 628.614.375 | | 1.024.993.898 | 50,33% | 50,33% |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 | 1.532.488.000 | 28,11% | 430.844.075 | 47,23% | 723.860.198 | 47,23% | 47,23% |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00 | 201.620.000 | 9,56% | 19.280.000 | 48,99% | 98.765.800 | 48,99% | 48,99% |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 100,00 | 76.100.000 | 98,95% | 75.300.000 | 98,95% | 75.300.000 | 98,95% | 98,95% |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
| Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan | 100,00 | 224.889.023 | 45,88% | 103.190.300 | 56,50% | 127.067.900 | 56,50% | 56,50% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Triwulan II Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Triwulan II Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | |
|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|---|----------|
| | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 50,33% | 50,33% |
| Predikat kinerja | | | | | | | | |
| <i>Program Pembinaan Pemerintah Desa</i> | 100,00 | 991.660.500 | | 323.146.900 | | 384.029.500 | | 39,82% |
| Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan | 100,00 | 118.608.400 | 38,76% | 45.977.600 | 43,29% | 51.347.600 | 43,29% | 43,29% |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD | 100,00 | 185.855.000 | 86,59% | 160.940.100 | 86,59% | 160.940.100 | 86,59% | 86,59% |
| Penataan Kewenangan Desa | 100,00 | 584.647.100 | 19,88% | 116.219.200 | 29,38% | 171.741.800 | 29,38% | 29,38% |
| Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes | 100,00 | 102.550.000 | - | - | - | - | - | - |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 39,82% | 39,82% |
| Predikat kinerja | | | | | | | | |
| <i>Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat</i> | | 2.402.005.000 | | 428.772.924 | | 637.025.424 | | 21,83% |
| Pendampingan Kelembagaan Desa | 100,00 | 778.800.000 | 11,58% | 90.209.575 | 12,15% | 94.589.575 | 12,15% | 12,15% |
| Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 1.407.630.000 | 21,38% | 300.891.649 | 35,86% | 504.764.149 | 35,86% | 35,86% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Realisasi Triwulan II Tahun 2018 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Triwulan II Tahun 2018 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%) | |
|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------|---|----------|
| | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |
| Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa | 100,00 | 215.575.000 | 17,47% | 37.671.700 | 17,47% | 37.671.700 | 17,47% | 17,47% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 21,83% | 21,83% |
| Predikat kinerja | | | | | | | | |
| Program Pendayagunaan SDA, TTT dan Pelatihan Masyarakat | 100,00 | 745.884.000 | | 161.173.576 | | 197.493.576 | | 24,03% |
| Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 100,00 | 310.292.000 | 9,45% | 29.325.000 | 9,45% | 29.325.000 | 9,45% | 9,45% |
| Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 435.592.000 | 30,27% | 141.848.576 | 38,61% | 168.168.576 | 38,61% | 38,61% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 24,03% | 24,03% |
| Predikat kinerja | | | | | | | | |
| Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 950.121.157 | | 154.809.800 | | 325.558.000 | | 34,26% |
| Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100,00 | 950.121.157 | 16,29% | 154.809.800 | 34,26% | 325.558.000 | 34,26% | 34,26% |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 34,26% | 34,26% |
| Predikat kinerja | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | 2.569.100.398 | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | 29,72% | 29,72% |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) | | | | | | | (SR) | (SR) |

Keterangan:

| | | |
|----|-----------------|------------------------|
| SR | : Sangat Rendah | (≤ 50 %) |
| R | : Rendah | (51 % ≤ 65 %) |
| S | : Sedang | (66 % ≤ 75 %) |
| T | : Tinggi | (76 % ≤ 90 %) |
| ST | : Sangat Tinggi | (91 % ≤ 100 %) |

Berdasarkan Tabel 1. di atas terlihat bahwa dari 14 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2018. Untuk 14 kegiatan yang dilaksanakan tersebut rata-rata capaian kinerja seluruh program belum di ketahui.

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana Indikatif kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun 2018 penjabarannya tertuang pada formulir VII.F.5 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada *Lampiran*.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Analisis Kinerja Pelayanan DPMD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPMD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPMD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMD bahwa ada 4 (empat) buah yang menjadi indikator yang dikaji yaitu:

1. Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatnya Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat;
4. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.3 Isu-isu penting Pelayanan Tugas dan Fungsi DPMD

Koordinasi dan sinergi program antara DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPMD Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu dilakukan karena hal itu merupakan sarana yang strategis untuk mendiskusikan dan mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Koordinasi dan sinergi program sangat diperlukan

sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan RPJMD 2017 – 2022 adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan Musrenbang yang dilangsungkan dari tahun ke tahun perlu lebih dioptimalkan untuk mengintegrasikan program-program pembangunan pusat – daerah secara tuntas. Selain itu, penajaman atas hasil-hasil dan kesepakatan selama Musrenbang untuk menjamin sinkronisasi berbagai program pusat daerah juga perlu dilakukan secara mendalam.

Isu Strategis

Isu Strategis yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat ini sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal.
2. Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan yang ada di desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan yang berkelanjutan.
3. Tingkat pengangguran di desa masih tinggi.
4. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa yang masih rendah.
5. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

6. Tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap publik belum optimal.

Dalam pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal dilakukan dengan strategi:
 - a. Melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG
2. Strategi dan arah kebijakan untuk mengoptimalkan pengembangan Potensi Unggulan yang ada di desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dengan strategi:
 - a. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan terhadap aparatur desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan.
3. Strategi dan arah kebijakan untuk mengurangi pengangguran di desa dilakukan dengan strategi:
- a. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian masyarakat desa dalam mencari peluang usaha.
 - Meningkatkan peran serta perempuan dengan prgram pokok PKK.
4. Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ekonomi desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Membentuk lembaga ekonomi desa dan cadangan pangan diperdesaan.
5. Strategi dan arah kebijakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat yang ada di desa terhadap pentingnya kesehatan yang dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Membentuk posyandu yang belum aktif.
 - Memberikan pemenuhan gizi terhadap anak sekolah daerah tertinggal.

6. Strategi dan arah kebijakan untuk mengatasi tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap publik yang belum optimal dilakukan dengan strategi:
 - a. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan di bidang pembangunan desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan Kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel.
 - Peningkatan kualitas penyusunan profil desa dan kelurahan se Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
 - Meningkatkan laju perkembangan desa dan kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD adalah dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada rancangan awal RKPD, DPMD mempunyai 4 program dengan menerapkan prinsip mandiri dimana target capaian dan pagu indikatifnya sama dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut perlu dilakukan agar Rancangan Awal RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2018 DPMD untuk 14 kegiatan yang dilaksanakan tersebut rata-rata capaian kinerja seluruh program sampai triwulan ke II sebesar 29,72% dengan predikat Sangat Rendah (SR). Untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan ke II sebesar Rp. 2.569.100.398,00 untuk rata-rata capaian kinerja seluruh program sebesar 36,06% dengan predikat Sangat Rendah (SR).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah *“Babel sejahtera, Provinsi maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”*.

Perlu ditempuh dengan menetapkan beberapa misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjang 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

✓ Misi ke-1 :

Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

✓ Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;

2. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
2. Meningkatnya kinerja perangkat desa;
3. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah;

3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD

Dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam urusan Rutin dan urusan Urusan Wajib untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain sebagai berikut :

A. Program Kegiatan Rutin/Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;
4. Program Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah;
5. Program Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Program Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pembinaan Pemerintahan Desa;
2. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat;
4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berikut disajikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018:

TABEL .4.5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1) | |
|------|---|---|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0 | | | | Non Urusan | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | - | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 8 | | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah | 100 %;3 NILAI | 3.161.774.947 | | | 100 %;3 NILAI | |
| 0 | 0 | 8 | 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan | Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan | 81 Orang | 1.788.874.947 | - | memasukkan indikator capaian dan tolak ukur program | 81 Orang | 2.320.211.250 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|-----------|-------------|---|---|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 8 | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | SKPD | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 Bulan | 81 Orang | 641.550.000 | - | | 81 Orang | 673.627.500 |
| 0 | 0 | 8 | 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | SKPD | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Disiplinnya | 81 Orang | 0 | - | | 81 Orang | 66.150.000 |
| 0 | 0 | 8 | 4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Luar Daerah, SKPD | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 10 orang | 105.000.000 | - | | 84 orang | 110.250.000 |
| 0 | 0 | 8 | 5 | Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi Serta Keuangan Perangkat Daerah | Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 0 | - | memasukkan indikator capaian dan tolak ukur program | 100% | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi, SKPD | Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% | 2 dokumen | 455.500.000 | - | | 2 dokumen | 290.000.000 |
| 0 | 0 | 8 | 7 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Provinsi, SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah | 5 laporan | 170.850.000 | - | | 5 laporan | 190.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|--|---|---|-----------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 13 | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | |
| 4 | 13 | 17 | | Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat | | Persentase KPM yang aktif ; Persentase Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan; Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian | 3,24 %;14,48 %;8,51 % | 1.265.382.053 | | | 3,24 %;14,48 %;10,64 % | |
| 4 | 13 | 17 | 1 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah | Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yangikutsertakan | 30 peserta | 567.105.000 | - | | 30 peserta | 894.478.497 |
| | | | | | | Jumlah Alat | 0 alat | | | | 3 alat | |
| | | | | | | Jumlah Peserta workshop TTG | 0 orang | | | | 30 orang | |
| 4 | 13 | 17 | 2 | Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah | Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan | 60 Pengurus BUMDes | 698.277.053 | - | Capain indikator dan perubahan RKA | 110 Pengurus BUMDes | 1.019.885.754 |
| | | | | | | Jumlah Kader KPM yang dibina | 50 Kader | | | | 33 Kader | |
| 4 | 13 | 18 | | Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | | Persentase kawasan perdesaan yang diintervensi | 0,65 % | 600.000.000 | | | 0,65 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|--|---|--|---------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------------|
| 4 | 13 | 18 | 1 | Pembangunan Kawasan Perdesaan | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Jumlah rakor | 1 rakor | 600.000.000 | - | merubah indikator capaian dan tolak ukur program, target kinerja, keluaran dan hasil sesuai renstra | 2 rakor | 1.441.961.026 |
| | | | | | | jumlah dokumen | 1 Rancangan | | | | 2 Rancangan | |
| | | | | | | jumlah kerjasama | 1 kerjasama | | | | 2 kerjasama | |
| 4 | 13 | 15 | | Program Pembinaan Pemerintah Desa | | Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya; Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina | 1,94 %;21 Desa/Kel | 1.397.150.000 | | | 1,94 %;21 Desa/Kel | |
| 4 | 13 | 15 | 1 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan Keuangannya | 61 desa | 179.750.000 | - | | 309 desa | 192.937.500 |
| 4 | 13 | 15 | 2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang | Jumlah BPD yang dibina | 40 orang | 467.400.000 | - | RKA dan KAK sub kegiatan belum digabung | 40 orang | 758.520.000 |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Desa yang dibina | 60 Aparatur | | | | 60 Aparatur | |
| 4 | 13 | 15 | 3 | Penataan Kewenangan Desa | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya | 12 Desa/kel | 600.000.000 | - | RKA dan KAK sub kegiatan belum digabung | 12 Desa/kel | 1.059.974.004 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|--|---|---|--|---------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | | Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina | 21 Desa/Kel | | | | 21 Desa/Kel | |
| | | | | | | Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun | 2 Laporan | | | | 2 Laporan | |
| 4 | 13 | 15 | 4 | Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Jumlah Bendahara Desa yang dibina | 34 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi | 150.000.000 | - | | 42 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi | 150.000.000 |
| 4 | 13 | 16 | | Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | | Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif; Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa | 3,07 %;4,66 %;12,94 % | 2.500.000.000 | | | 3,07 %;7 %;9,71 % | |
| 4 | 13 | 16 | 1 | Pendampingan Kelembagaan Desa | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat | Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif | 10 Lembaga Adat | 500.000.000 | - | indikator capaian kinerja, keluaran, hasil, disesuaikan dengan renstra | 10 Lembaga Adat | 1.099.122.437 |
| | | | | | | Jumlah BUMDES yang aktif | 30 BUMDes | | | | 30 BUMDes | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa dikabupaten yang terbentuk | 10 Lembaga | | | | 10 Lembaga | |
| | | | | | | Jumlah Pokjanal Posyandu aktif | 50 Pokjanal Posyandu | | | | 75 Pokjanal Posyandu | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|---|-----------------|---------------|---|---|-----------------|----------------|
| 4 | 13 | 16 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat | Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur | Jumlah Kelompok PKK yang dibina | 12 Kelompok PKK | 1.500.000.000 | - | capaian program, keluaran, hasil disesuaikan dengan renstra | 12 Kelompok PKK | 1.987.256.250 |
| | | | | | | Jumlah rakor PKK Provinsi yang terlaksana | 20 Rakor | | | | 20 Rakor | |
| | | | | | | Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM | 7 Desa/Kel | | | | 7 Desa/Kel | |
| 4 | 13 | 16 | 3 | Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat | Jumlah bantuan alat | 9 Unit | 500.000.000 | - | merubah RKA dan KAK | 8 Unit | 1.466.325.000 |
| | | | | | | Jumlah Dokumen | 2 Laporan | | | | 2 Laporan | |
| | | | | | | Jumlah Peserta | 160 orang | | | | 160 orang | |
| | | | | | | Jumlah Rakor | 1 Rakor | | | | 1 Rakor | |
| | | | | | TOTAL | | | 8.924.307.000 | | | | 13.720.699.218 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencapai sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.